

MEMAHAMI KABAR SEJARAH DAN PERIODE DEMOKRASI DI INDONESIA

Yeyen Subandi

Universitas Darussalam Gontor

Email : yeyen.subandi@unida.gontor.ac.id

Abstract

“Democracy is; when the majority vote more mainstream, and more important than truth of the word of God “. Democracy is a political process that not only promote or rely on what was a policy, the policy is not only supporting the political process in a democracy, but the policy could be a boomerang on democracy. Not necessarily people know, nor understand what democracy is, and also after the process was whether the majority of the people agree with democracy, although the notion of democracy is government by and for the people. Or most people are forced to accept democracy. Indeed, the idea of democracy that was born of the human mind, which at the time was not satisfied with the system at the time imperliasmе theotracy western, democratic system that all countries are proud of the fact that the system has only transferred power from the hands of the church into the hands of the capitalist, not to the people. And very reasonable at all in fact when democracy remain state hands, not in the hands of the people, because we presume, are the state church, church is the master, and this process is not widely known by the public (us) as citizens. And in the 15th century also the creed of secularism was born.

Keyword: Democracy, Indonesian Democracy, History of Democracy

Pendahuluan

Akhir-akhir ini suasana demokrasi di Indonesia sungguh sangat terganggu, apakah negara kita bisa menjalankan proses demokrasi ataukah tidak? Seperti isu-isu dari, / yang mengatasnamakan kelompok/ golongan, agama, ras ataupun lainnya lagi-lagi mengatasnamakan "demokrasi". Dan aksi-aksi/ demonstrasi yang terjadi merupakan protes rakyat terhadap negaranya, dan protes rakyat terhadap pemimpinnya, memang betul beberapa ideology yang ada menerapkan/ mengedepankan proses politiknya dalam demokrasi.

A. Pengertian Demokrasi

Dalam perkembangannya semua orang sudah tidak awam lagi ketika mendengar kata demokrasi. Menurut pengertiannya demokrasi yaitu terdiri dari dua kata, berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*Demos*" berarti rakyat atau penduduk, dan "*Cratein*" atau "*Cratos*" berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dari dua kata tersebut terbentuklah suatu istilah "*demoscratein*" atau "*demokratia*" yang berarti disini (negara) dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat, atau pemerintahan negara rakyat yang berkuasa.

Secara terminologi demokrasi menurut Joseph A. Schmeter adalah: demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Kita sebagai warga negara, demokrasi merupakan cita-cita dari masyarakat dunia yang menginginkan pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tetapi dalam perjalanannya demokrasi tidak sesuai dengan harapan, dan juga terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam prosesnya.

Indonesia yang masih belajar dalam proses demokrasi bagaimana kedepannya, apakah sanggup dengan proses demokrasi dan kebebasan, dan juga proses didalam politiknya, karena demokrasi merupakan proses dari politik.

B. Sejarah Singkat Tentang Demokrasi

Demokrasi dalam sejarah peradaban muncul sejak jamam Yunani Kuno di mana rakyat memandang kediktatoran sebagai bentuk pemerintahan terburuk. Capaian praktis dari pemikiran demokrasi Yunani adalah munculnya “negara kota”. Dengan Polis adalah bentuk demokrasi pertama. Demokrasi berasal dari kata lain yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan).

Peradaban Yunani menunjukkan bahwa masyarakat Yunani dipecah menjadi kota-negara bagian yang kecil-kecil (tidak lebih dari 10.000 warga). Setiap orang menyuarakan pendapatnya atas persoalan-persoalan pemerintahan. Istilah demokrasi sendiri pertama kali di kemukakan pada pertengahan abad 5 M di Athena.

Konsep tentang demokrasi memang sulit untuk dipahami, karena ada beberapa kesamaan makna/ arti. Oleh sebab itu tidak begitu mudah membuat definisi atau pengertian yang baku apa itu demokrasi.

Demokrasi diakui banyak orang dan negara sebagai sistem nilai kemanusiaan yang paling menjanjikan masa depan umat manusia di dunia. Abraham Lincoln adalah presiden Amerika Serikat pertama yang pernah mengatakan, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sementara kalau dilihat dari proses dan perkembangannya apakah Amerika bisa dibilang sebagai negara demokrasi?, karena kalau kita lihat Amerika, proses partisipasi politik dari kaum perempuan dan juga kulit hitam begitu lamban dalam memberikan

suara apalagi untuk menjabat pada posisi jabatan tertentu, itu lah dulu Amerika, sekarang sudah berbeda.

C. Doktrin Klasik Demokrasi

Filsafat demokrasi dari abad kedelapan belas dapat di definisikan sebagai berikut:

“Metode demokratis adalah bahwa pengaturan kelembagan untuk sampai pada keputusan-keputusan politik yang menyadari kebaikan umum dengan membuat masyarakat memutuskan masalah-masalahnya sendiri melalui pemilihan undividu-individu untuk berkumpul dalam rangka melaksanakan kehendaknya sendiri”.

Demokrasi merupakan proses politik yang tidak hanya mengedepankan atau mengandalkan apa itu suatu kebijakan, kebijakan tersebut bukan hanya mendukung proses politik didalam demokrasi, akan tetapi bisa saja kebijakan tersebut menjadi bumerang dari demokrasi tersebut.

Belum tentu orang tahu, mengerti, ataupun paham apa itu demokrasi, dan juga setelah proses itu apakah sebagian orang/ rakyat setuju dengan demokrasi walaupun pengertian demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Ataupun sebagian orang/ rakyat dipaksa untuk menyetujui adanya demokrasi.

Kalau kita melihat doktrin klasik mengenai demokrasi kita seolah-olah berusaha untuk menerima semua asumsi yang sudah dibuat oleh teori pemerintahan, dan oleh itu kita bisa menyanggahnya, dengan argumen; *pertama*, tidak semua orang bisa menyetujui atau harus setuju dengan argumentasi rasional yang ada, hal ini disebabkan karena individu atau kelompok menginginkan kebaikan bersama, tetapi adanya hal yang berbeda. Faktanya, dimana tersembunyi utilitarian, dimana sempitnya mengenai pandangan tentang dunia terhadap penilaian manusia.

Kedua, jika kebaikan umum yang cukup pasti, seperti untuk kepuasan ekonomi maksimum utilitarian, dimana kebahagiaan terbesar akan membuka keraguan yang serius. Dan *ketiga* yaitu, khusus konsep dari kehendak rakyat yaitu bahwa utilitarianisme membuat milik mereka sendiri hilang.

Demokrasi yang lebih dikenal dengan kebebasan individu, dan juga kebebasan serta kehendak rakyat didalam menentukan apa yang ingin disampaikannya sampai ada yang terwujud. Kita juga bisa melihat sifat manusia dalam politik, selama paruh kedua abad belakangan, gagasan kepribadian manusiayang homogeny dan gagasan kepastian keinginan yang merupakan penggerak utama dari tindakan telah memudar.

D. Demokrasi di Indonesia Dilihat Dari Periode Perkembangannya

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, didalam Undang Undang Dasar memberikan gambaran/ penjelasan, dimana Indonesia merupakan negara demokrasi. Karena dengan mekanisme kepemimpinan Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR, dan MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari rakyat.

Secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan/ kekuasaan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu Indonesia pernah mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan Indonesia pada waktu itu.

Setelah mengalami masa Demokrasi pancasila pada jaman orde lama atau era Soekarno, sebuah demokrasi semu muncul yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Dan demokrasi ini bisa disebut sebagai demokrasi reformasi.

1. **Periode Demokrasi Parlementer (1945 – 1959)**

Demokrasi dimasa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamkan. Namun demikian model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia, dengan alasan karena lemahnya budaya demokrasi masyarakat Indonesia untuk mempraktekkan demokrasi model barat.

Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya, pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masanya jarang dapat bertahan lama. Koalisi yang dibangun dengan sangat mudah pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun. Persaingan tidak sehat antara faksi-faksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat telah mengancam berjalanya demokrasi itu sendiri.

Faktor-faktor disintegrasi diatas, ditambah dengan kegagalan partai-partai dalam majelis konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar Negara untuk undang-undang dasar baru, mendorong presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit presiden pada 5 juli 1959 yang menegaskan berlakunya kembali undang-undang dasar 1945.

Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir, diganti oleh demokrasi terpimpin yang memposisikan presiden Soekarno menjadi pusat kekuasaan Negara.

2. **Periode Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)**

Pada periode ini lebih di kenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI dalam panggung politik nasional, dan juga pengetatan berita-berita di media pada waktu itu. Hal ini di sebabkan oleh lahirnya dekrit presiden 5 juli 1959 sebagai usaha untuk

mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan nasional personal yang kuat.

Walaupun didalam UUD 1945 memberi peluang presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun ketetapan MPRS No. III/1963 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup dengan lahirnya ketetapan MPRS ini secara otomatis telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana ketetapan UUD 1945.

Kepemimpinan presiden tanpa batas ini terbukti melakukan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan UUD 1945. Dengan contoh pada tahun 1960 presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari hasil pemilihan umum, hal semacam ini merupakan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap demokrasi atau proses demokrasi. Padahal dalam penjelasan UUD 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak memiliki wewenang untuk berbuat demikian. Dengan kata lain, sejak diberlakukan dekrit presiden 1959 telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh presiden. Demokrasi dipimpin dalam model Soekarno adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yakni lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada diri pemimpin, dan pada saat yang sama hilangnya kontrol sosial, keseimbangan (*check and balance*), diantara legislatif terhadap eksekutif.

Dalam kehidupan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) sangatlah menonjol. Bersandar pada dekrit presiden 5 juli sebagai sumber hukum didirikan banyak badan ekstra konstitusional seperti front nasional yang digunakan oleh PKI sebagai kegiatan wadah politik. Front nasional telah dimanipulasi oleh PKI untuk menjadi bagian strategi taktik komunisme internasional yang menggariskan pembentukan front nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya demokrasi rakyat.

Strategi politik PKI untuk mendulang keuntungan dari kharisma kepemimpinan presiden Soekarno dengan cara mendukung pemberedelan

pers dan partai politik misalnya Masyumi yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan.

Perilaku politik PKI yang berhaluan sosialis marxis tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh partai politik islam dan kalangan militer (TNI) yang pada waktu itu merupakan salah satu komponen politik penting presiden Soekarno. Akhir dari demokrasi terpimpin presiden Soekarno yang berakibat dari perseteruan politik ideologi santara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang dikenal dengan gerakan 30 september 1965.

3. Periode Demokrasi Orde Baru (1965 – 1998)

Periode ini merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto dengan orde barunya. Sebutan orde baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, orde lama. Orde lama, sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap undang-undang dasar 1945 yang terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi terpimpin ala Soekarno telah diganti oleh elite orde baru dengan demokrasi pancasila.

Beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk presiden Soekarno telah dihapuskan dan diganti dengan pembatasan jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses pemilu. Demokrasi pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. *Pertama*, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas Negara hukum dan kepastian hukum. *Kedua*, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga Negara. *Ketiga*, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Hal yang sangat disayangkan adalah, alih-alih pelaksanaan ajaran pancasila secara murni dan konsekuen, demokrasi pancasila yang

dikampanyekan oleh orde baru, baru sebatas retorika politik belaka. Dalam praktik kenegaraan dan pemerintahannya, penguasa orde baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.

4. **Periode Pasca Orde Baru (Periode Reformasi)**

Periode pasca orde baru sering disebut era reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya presiden Soeharto dari tumpuk kekuasaan orde baru pada Mei 1998. Setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan demokrasi pancasilanya. Penyelewengan atas dasar Negara Pancasila oleh penguasa orde baru berdampak pada sikap antipasti sebagian masyarakat terhadap dasar Negara tersebut.

Pengalaman pahit yang menimpa Pancasila, yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif dan penuh nuansa HAM, berdampak pada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin pada pengalaman manipulasi atas Pancasila oleh penguasa orde baru, demokrasi yang hendak dikembangkan setelah kejatuhan oleh rezim orde baru adalah demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel dimana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Wacana demokrasi pasca orde baru erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh.

E. **Kesimpulan**

Setelah melihat apa itu pengertian demokrasi dan sejarahnya, serta negara (Amerika) yang mengklaim dirinya sebagai bentengnya demokrasi kita bisa melihat, dan kita melihat proses demokrasi di negara kita sendiri, secara umum apakah benar bahwa demokrasi merupakan proses politik dari,

oleh, dan untuk rakyat, sepertinya itu tidak, karena masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara sebagai penguasa, adanya diskriminasi negara sebagai penguasa pada kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Dan juga ada yang terlupakan, bahwa sesungguhnya paham demokrasi yang lahir dari akal manusia, dimana pada waktu itu tidak puas dengan sistem theocracy pada masa imperiasme barat, sistem demokrasi yang semua negara banggakan pada kenyataannya sistem tersebut hanya memindahkan kekuasaan dari tangan gereja ke tangan kapitalis, bukan ke tangan rakyat. Dan sangat wajar sekali pada kenyataannya ketika demokrasi tetap berada di tangan negara, bukan di tangan rakyat, karena kita anggap gereja adalah negara, gereja adalah penguasa, dan proses inilah yang belum banyak diketahui oleh masyarakat (kita) sebagai warga negara. Dan di abad 15M pun akidah sekularisme lahir. Disini kita tidak membicarakan apa itu sosial-demokrasi, demokrasi-sosialis, ataupun demokrasi liberal, tetapi kita membicarakan demokrasi secara umum.

Dan secara khusus untuk Indonesia sendiri apakah bisa melakukan proses demokrasi dari jaman kemerdekaan sampai saat ini, walaupun dalam prosesnya hanya mengalami sebentar saja dalam proses demokrasi yang sesungguhnya. Indonesia yang ber ideologikan pancasila ketika pertama kalinya negara ini terbentuk, dan sampai saat ini kita masih berideologikan pancasila, dan berdemokraskan pancasila, tetapi ideology pancasila yang turunan, atau turun temurun kita yang generasi sekarang generasi pewaris. Kenapa dikatakan ideology pancasila yang turunan? Karena kita hanya bisa menyebutkan atau menghapuskan butir-butir pancasila, dalam prakteknya pancasila masih dilanggar baik itu oleh penguasa (Negara) maupun rakyat didalam negara tersebut.

Di dalam demokrasi sebenarnya ada nilai-nilai demokrasi yang sifatnya universal yaitu: *Pertama*, adanya pengakuan atas hak-hak dasar atau lebih

dikenal dengan hak asasi manusia. *Kedua*, adanya pluralism. *Ketiga*, adanya kompetisi bebas, dan *keempat* adanya persamaan dan kesetaraan. Kalau kita melihat Indonesia apakah sudah kearah dari keempat prinsip universal tersebut, atautkah masih adanya pelanggaran-pelanggaran, sudah jelas demokrasi di negara kita masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh negara dan juga adanya diskriminasi yang dilakukan oleh negara pula.

Indonesia pernah eksis didalam demokrasi, tetapi hanya beberapa tahun saja yaitu dari September 1945 sampai 1957 yang lebih dikenal dengan periode demokrasi parlementer. Dimana periode ini gagal ketika polisi sipil mengalami kegagalan dalam memebentuk pemerintahan yang stabil.

Berilah kesempatan bernafas untuk demokrasi di negeri ini, biarkanlah demokrasi di negara kita ini menghirup nafasnya walau hanya sebentar, dengan kata lain daripada khawatir, demokrasi bisa memunculkan kecenderungan “tidak terima kalah” di kalangan partai-partai agama (bahkan partai-partai-fundamentalis sekalipun), dan yang lebih dikhawatirkan juga situasi yang tidak demokratislah yang paling memungkinkan mendominasinya konfigurasi kekuatan cleric-fascist dan kaum fasis militer. Dengan kata lain mereka itulah ancaman bagi demokratisasi yang paling potensial.

Indonesia masih belum mampu menjalankan demokrasi, karena kita belum siap dengan kebebasan individu, kelompok atau golongan ketika menginginkan pengakuan atau legalitas yang mengatas namakan demokrasi, atau mengatas namakan Hak Asasi Manusia (HAM), lagi-lagi itu yang menjadi kartu as ketika beberapa kali adanya aksi atau demonstrasi. Dan pemerintah sebagai penentu kebijakan masih belum sanggup berlaku adil, karena masih adanya intervensi dari suara mayoritas baik itu dari partai politik, ataupun golongan tertentu. “Demokrasi adalah proses di mana orang-

orang memilih. Seseorang yang kelak akan mereka salahkan” (Bertrand Russell). Masihkah kita akan terus berjuang demi demokrasi? Demokrasi yang seperti apa?

Daftar Pustaka

- Joseph A. Schumpeter. 2013. *Capitalism, Socialism & Democracy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dadang Juliantara. 2000. *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Eko Supriyadi. 2003. *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prof. Dr. Thomas Meyer. *Sosial-Demokrasi Dalam teori dan Praktik Pengalaman Kaum Sosial-Demokrat Jerman*. Yogyakarta: CSDS